

**STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SOP) PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK**

	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK OLEH PEJABAT PENGELOLA INFORMASI &amp; DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SETDA PROVINSI BANTEN</b>		
	<b>PEMERINTAH PROVINSI BANTEN</b>	<b>NOMOR SOP</b>	488 /6-Pemotda.PPIDP/2024
	<b>BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SETDA PROVINSI BANTEN</b>	<b>TANGGAL PEMBUATAN SOP</b>	5Januari 2024
		<b>TANGGAL REVISI</b>	
		<b>PENGESAHAN</b>	8 Januari 2024
		<b>DISAHKAN OLEH</b>	KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SETDA PROVINSI BANTEN
		<b>JUDUL SOP</b>	PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DIP
		<b>DISAHKAN OLEH</b>	 KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH, <b>SETDA</b>  SUGIANTORO, AP, M.SI NIP. 19741004 199402 1 002

NO	DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANAAN
1	UUD NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK	1	MINIMAL SARJANA
2	PP NOMOR 61 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN UUD DASAR NO. 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK	2	MENGUASAI TANDA PEMBUKUAN
3	PERATURAN DAERAH NO 8 TAHUN 2012 TENTANG TATA KELOLA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, DAN DITERBITKNYA	3	MEMILIKI PENGETAHUAN MENGENAI PELAYANAN PRIMA

4	PERKIRAMONER 1 TAHUN 2017 TENTANG PENGKLASIFIKASIIN INFORMASI	4	MEMILIKI TATA KRAMA
5	PERATURAN GUBERNUR NO 67 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN		
6	KEPUTUSAN GUBERNUR NO 489.1/Kep. 50-Huk/2022 PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1	DENGAN MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN INFORMASI DARI PEMERINTAH	1	FORMULIR ISIAN
		2	COMPUTER
		3	PESAWAT TELVON
		4	JARINGAN INTERNET
		5	ATK
1	BILA PROSEDUR ADA YANG TERLEWATI MAKATIDAKAKANTERLAYANI DENGAN BAIK	1	DICATAT PADA BUKU REKAP INFORMASI
2	BILA PROSEDUR TIDAK BERJALAN MAKA PELAYANAN PRIMA TIDAK AKAN TERCAPAI		
3	BILA PROSEDURINI TIDAK DIKERJAKAN IMAGE PEMERINTAH DAERAH TERHADAP MASYARAKAT NEGATIF		

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN			PENDUKUNG		KETERANGAN
		PPID PELAKSANA	PPID UTAMA	ATASAN PPID	KELENGKAPAN	WAKTU	
1	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang berkualitas dan relevan dengan tujuan masing-masing komponen OPD dan selaku PPID Pelaksana di Lingkungan Biro Pemda Banten, hak yang diproduksi sendiri, dikembangkan maupun yang dikirim kepihaklain.yang berupa arsip statis maupun dinamis, arsip aktif dan arsip vital yang dikuasai				1. UU No.14 Tahun 2008 2. PP No 61 Tahun 2010 3. Permendagri No.3 Th 2017 4. Perki No 1 Tahun 2021 5. Peraturan Gubernur No 67 tentang Perubahan Atas Peraturan No 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi di Lingkungan Pemprov Banten 6. Kepgub No 489.1/Kep.50-Huk/2022	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	Daftar Informasi Publik yang telah dikumpulkan dari komponen dan Perangkat Daerah
2	Mengklasifikasi seluruh informasi dan dokumentasi yang telah dikumpulkan dan mengidentifikasikannya berdasarkan sifat informasi dan dokumentasi				Alat tulis kantor	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	Daftar Informasi Publik yang telah diklasifikasi kebenarannya
3	Mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk soft copy dan tempat penyimpanan dokumentasi dalam bentuk hard copy				Mengadakan rapat bersama dengan PPID Utama PPID Pelaksana Untuk menetapkan Daftar Informasi Publik	Setelah Daftar Informasi Publik terkumpul dari PPID Pelaksana	Surat Keputusan Daftar Informasi Publik yang ditandatangani oleh Atasan PPID
4	Menetapkan daftar informasi publik secara resmi sesuai dengan klasifikasi informasi dan dokumentasi publik				Website dan sarana informasi lainnya yang dimiliki oleh komponen dan Pemerintah Provinsi Banten	Setelah Daftar Informasi Publik ditetapkan oleh Atasan PPID	Setelah Daftar Informasi Publik ditetapkan, jika ada tambahan informasi baru, dibuat SK untuk ditetapkan
5	Mengakses dan mengunggah informasi publik ke website resmi Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Banten maupun sarana informasi lainnya					Adanya konten Daftar Informasi Publik di website Pemerintah Provinsi Banten	Setelah Daftar Informasi Publik ditetapkan jika ada tambahan informasi baru ada tambahan untuk ditetapkan